

**PERAN *ARU BILA* DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
KOLONIAL DI SOPPENG TAHUN 1905-1935**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Pada
Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

JULIA NUR FADILA

F061191012

**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Sesuai dengan surat penugasan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Nomor : 488/UN4.9/KEP/2023

Tanggal : 24 Maret 2023

Nama Mahasiswa : Julia Nur Fadila

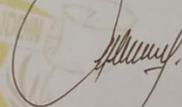
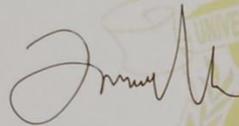
NIM : F061191012

Menyetujui skripsi ini, untuk diteruskan kepada Tim Penguji di Departemen Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Makassar, 15 September 2023

Pembimbing I

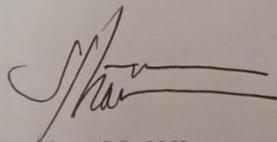
Pembimbing II



Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A.
NIP. 19741016 200312 1 001

Nasihin, S.S., M.A.
NIP. 19820403 202204 3 001

Disetujui untuk diteruskan
kepada Panitia Ujian Skripsi
Dekan
u.b. Ketua Departemen Ilmu Sejarah



Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 19760827 200801 1 011

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Jumat Tanggal 27 Oktober 2023, panitia ujian skripsi menerima dengan baik skripsi mahasiswa atas nama ;

Nama : Julia Nur Fadila

NIM : F061191012

dengan judul:

PERAN ARU BILA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN KOLONIAL DI SOPPENG TAHUN 1905-1935

yang telah diajukan dan dipertahankan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra (S.S) Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Makassar, 27 Oktober 2023

1. Dr. Amrullah Amir, S.S, M.A. Ketua : 1

2. Nasihin, S.S., M.A. Sekretaris : 2

3. Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum. Penguji I : 3

4. Dr. Ida Liana Tanjung, M. Hum. Penguji II : 4

5. Dr. Amrullah Amir, S.S, M.A. Pembimbing I : 5

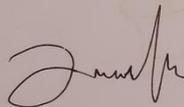
6. Nasihin, S.S., M.A. Pembimbing II : 6

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERAN ARU BILA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
KOLONIAL DI SOPPENG TAHUN 1905-1935
Nama Lengkap : Julia Nur Fadila
NIM : F061191012

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 27 Oktober 2023 dan dinyatakan sah memenuhi syarat untuk lulus pada program sarjana di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin.

Konsultan I



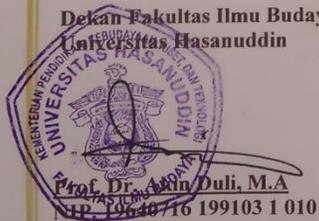
Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A.
NIP. 19741016 200312 1 001

Konsultan II



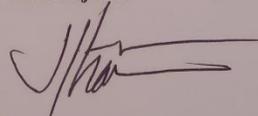
Nasihin, S.S., M.A.
NIP. 19820403 202204 3 001

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Amin Duli, M.A.
NIP. 19640716 199103 1 010

Ketua Departemen
Ilmu Sejarah



Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 19760827 20080 11 011

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS DAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Julia Nur Fadila

NIM : F061191012

Departemen : Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Hasanuddin

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PERAN ARU BILA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN KOLONIAL DI SOPPENG TAHUN 1905-1935

merupakan skripsi yang telah saya susun untuk memenuhi salah satu syarat lulus dan memperoleh gelar akademik di Universitas Hasanuddin. Seluruh sumber yang digunakan baik yang dikutip maupun dirujuk telah diperiksa dan saya nyatakan benar sesuai dengan kaidah dalam penulisan karya ilmiah yang berlaku. Semua sumber yang digunakan dan dirujuk secara langsung dalam tulisan telah dicantumkan ke dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku, sesuai dalam aturan yang telah ditetapkan di Universitas Hasanuddin.

Makassar, 27 Oktober 2023



Julia Nur Fadila

KATA PENGANTAR

Rasa syukur tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas berkat dan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta atas petunjuk dan pertolongan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., keluarga, serta para sahabatnya.

Tujuan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Aru Bila dalam Sistem Pemerintahan Kolonial di Soppeng Tahun 1905-1935”** merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan ini terdapat banyak hambatan dan kendala yang dialami, namun berkat Inayah dari Allah SWT. dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta bantuan dari berbagai pihak maka hambatan dan kendala tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut andil baik secara langsung maupun tidak langsung, moral maupun material. Ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua, terima kasih atas semua doa, kerja keras, perhatian dan kasih sayang yang diberikan. Terima kasih telah menjadi orang tua yang baik. Kepada Bapak Junaedy, terima kasih atas dukungan yang diberikan sejak awal penulis menempuh pendidikan hingga saat ini. Terima kasih tidak lupa

penulis ucapkan kepada Ibu Jusnalia yang telah menjadi tempat penulis mengadu banyak hal, dan terus mengingatkan untuk mengerjakan skripsi ini.

2. Kedua adik, Muh. Jayadi dan Juvita Sri Afifah terima kasih atas dukungan yang tak henti-hentinya diberikan. Tak lupa juga terima kasih diucapkan kepada sepupu: Nur Alya, Wiwi Elisa Putri, dan Mirwa Astika Sary yang sudah menjadi teman curhat dan menemani saat sedang jenuh. Terima kasih penulis ucapkan pula kepada Kasriamal atas dukungan yang tiada henti diberikan selama penulis dalam masa penyusunan proposal maupun skripsi. Terima kasih atas waktu untuk mendengarkan segala cerita, tidak terkecuali keluh kesah dalam penyusunan skripsi.
3. Penulis juga sangat berterima kasih kepada Bapak Amrullah Amir, S.S., M.A. selaku pembimbing pertama dan Bapak Nasihin, S.S., M.A. selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas waktu luang yang diberikan untuk membagikan ilmu dan masukannya. Mulai dari bantuan pencarian literatur bacaan dan arsip serta meluangkan waktu untuk membaca dan mengoreksi tulisan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ketua Departemen Ilmu Sejarah dan selaku pembimbing akademik (PA), Bapak Dr. Ilham, S.S., M.Hum. Terima kasih juga kepada dosen-dosen Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, kepada Drs. Dias Pradadimara yang banyak membantu dalam penyusunan proposal, Dr. Muhammad Bahar Akase Teng, LCP, M.Hum., Dr. Nahdia Nur, M.Hum., A. Lili Evita, S.S., M.Hum., Dr. Ida

Liana Tanjung, M.Hum., Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag., Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum., Dr. Muslimin A.R. Effendy, M.A. yang telah mengajar dan membagikan ilmu serta pengetahuannya. Tak lupa pula terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Uddji Usman Pati, S.Sos. yang banyak membantu dalam pengurusan administrasi hingga berkas-berkas dapat diselesaikan dengan lancar.

5. Bapak Muhammad Amir, Bapak Drs. A. Khaerul Umur, M.Si., Ibu A. Isa Tenrisompala dan para pegawai di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang banyak membantu penulis dalam pencarian literatur bacaan dan arsip. Terima kasih atas waktu dan segala bantuan yang telah diberikan.
6. Terima kasih tidak lupa penulis ucapkan kepada Nirmalasari yang menjadi teman diskusi berbagai hal dan tidak sedikit bantuan yang diberikan dalam penyusunan baik proposal maupun skripsi. Ucapan terima kasih juga penulis berikan kepada Risman dan Sukmayani atas dukungan dan menjadi pendengar keluh kesah penulis.
7. Kepada teman-teman SMKN 7 Makassar, Syarifah Farah Refiana, Dia Mardiana, Dini Iftihani, S.H., Dinayanti Putri Septriani, S.H., A. Mariska Amelia, terima kasih telah menjadi teman berbagi dan mendoakan agar penulisan ini segera terselesaikan.
8. Terima kasih pula kepada Suryana Nengsih selaku teman semasa SMP sekaligus adik tingkat di Departemen Ilmu Sejarah, terima kasih atas

dukungan yang diberikan serta teman sharing penyusunan proposal dan skripsi.

9. Ucapan terima kasih penulis kepada teman-teman Ilmu Sejarah 2019 Muh. Rifqi, Muhammad Rijal, Adlika Bela, Nur Halisa, Tri Novianti Sallata, Muhammad Amin, Fitrah Nur Akbar dan teman-teman lain yang selalu membantu agar penulisan ini segera selesai.
10. Kepada teman-teman KKN Perhutanan Sosial Bone khususnya Posko 7 Cinnong, Kismawakia S.Pi., dan Irfa Anisa Pratami, S.Si. atas dukungan dan doa agar segera menyelesaikan penyusunan skripsi.
11. Kepada pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang turut serta dalam membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis.

Penulisan karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu segala masukan, saran dan kritikan sangat dibutuhkan untuk membantu kesempurnaan skripsi ini. Semoga bantuan yang diberikan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Swt.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS DAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR ISTILAH.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Batasan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	10
1.6. Tinjauan Pustaka.....	10
1.6.1. Penelitian Yang Relevan.....	10
1.6.2. Landasan Konseptual.....	13
1.7. Metode Penelitian	16
1.8. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	21
ONDERAFDEELING SOPPENG 1905-1935.....	21
2.1. Terbentuknya Kedaduan Soppeng.....	22
2.1.1. Kedaduan Soppeng Dua Datu Seddi Ata.....	22
2.1.2. Kedaduan Soppeng Satu Datu Satu Rakyat.....	25
2.2. Pemerintahan Tradisional Soppeng.....	29

2.3. Penaklukan Soppeng 1905.....	32
BAB III.....	36
PERUBAHAN SISTEM POLITIK.....	36
3.1. Kebijakan Politik Pemerintahan Belanda di <i>Afdeeling</i> Bone.....	38
3.1.1. Penaklukan Bone.....	38
3.1.2. <i>Afdeeling</i> Bone Pada Masa Kolonial.....	42
3.2. Kebijakan Politik Pemerintahan Belanda di <i>Onderafdeeling</i> Soppeng.....	47
3.2.1. <i>Onderafdeeling</i> Soppeng Masa Kolonial.....	47
BAB IV.....	55
PERANAN ARU BILA PADA MASA PEMERINTAHAN BELANDA.....	55
4.1. Biografi Singkat Aru Bila La Tenridolong Baso Bila.....	56
4.2. Kedudukan Aru Bila Sebelum dan Setelah Pendudukan Belanda.....	58
4.3. Peran Aru Bila dalam Sistem Pemerintahan Belanda.....	63
BAB V.....	69
KESIMPULAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
ARSIP/SUMBER PRIMER.....	71
SUMBER SEKUNDER (BUKU, JURNAL, SKRIPSI/TESIS).....	72
LAMPIRAN.....	75
PETA.....	75
SILSILAH.....	76
ARSIP.....	77
BIODATA PENULIS.....	87

DAFTAR ISTILAH

<i>To Manurung</i>	: Orang yang dipercaya turun dari langit
<i>Aru /Arung</i>	: Raja
<i>Datu</i>	: Gelar raja
<i>Sulledatu</i>	: Wakil raja
<i>Pabbicara</i>	: Pembicara
<i>Pangepa</i>	: Penggendong
<i>Watanlipu</i>	: Kepala angkatan perang
<i>Sullewatang</i>	: Wakil kepala angkatan perang
<i>Afdeeling</i>	: Pusat pemerintahan
<i>Onderafdeeling</i>	: Cabang pemerintahan
<i>Adatgemeenschap</i>	: Masyarakat adat
<i>Matoa</i>	: Orang yang dituakan
<i>Korte verklaring</i>	: Perjanjian pendek
<i>Zelfbestuur</i>	: Pemerintahan sendiri

ABSTRAK

Julia Nur Fadila, Nomor Induk Mahasiswa F061191012, dengan judul “Peran Aru Bila dalam Sistem Pemerintahan Kolonial di Soppeng Tahun 1905-1935” dibimbing oleh Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D. dan Nasihin, S.S., M.A.

Penelitian ini berusaha mengkaji kedudukan Aru Bila setelah pemerintah Belanda menaklukkan kedatuan Soppeng dan peran Aru Bila pada masa pemerintahan kolonial tahun 1905-1935. Tujuan dari penelitian ini diharapkan agar penulis maupun pembaca mengetahui dan memahami kedudukan serta peranan Aru Bila pada tahun 1905-1935. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode sejarah yang terdiri dari pengumpulan sumber sejarah, kritik terhadap sumber sejarah, penafsiran dan penulisan sejarah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dipulihkannya kembali kedudukan kedatuan Soppeng pada tahun 1926 maka anggota hadat Soppeng bersama-sama menjalankan pemerintahan dengan status daerah berpemerintahan sendiri. Aru Bila dengan jabatan sebagai *pangepa* mewakili kekuasaan eksekutif bertanggungjawab atas pelaksanaan pemerintahan di Kedatuan Soppeng. Dalam menjalankan pemerintahan, Aru Bila bertanggungjawab atas urusan administrasi pemerintahan dan urusan yang berkaitan dengan perkara sipil, baik masalah pembeslahan maupun pelelangan. Selain itu, Aru Bila juga bertugas dalam memeriksa wilayah-wilayah Soppeng lainnya seperti memeriksa kebersihan kampung, memeriksa jalan, dan memeriksa sekolah-sekolah.

Kata Kunci: Peran, Sistem Pemerintahan, dan Kolonial

ABSTRACT

Julia Nur Fadila, Student Identification Number F061191012, entitled "The Role of Aru Bila in the Colonial Government System in Soppeng in 1905-1935" was supervised by Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D. and Nasihin, S.S., M.A.

This study seeks to examine the position of Aru Bila after the Dutch government conquered Soppeng sovereignty and the role of Aru Bila during the colonial rule in 1905-1935. The purpose of this study is expected so that the author and readers know and understand the position and role of Aru Bila in 1905-1935. The method used in this study is a historical method consisting of collecting historical sources, criticism of historical sources, interpretation and writing history.

Based on the results of the study showed that after the restoration of the position of Soppeng Sovereignty in 1926, the members of the Soppeng hadat jointly run the government with the status of self-governing regions. Aru Bila with a position as pangepa representing executive power is responsible for the implementation of government in Soppeng State. In running the government, Aru Bila is responsible for government administration and affairs related to civil matters, both clearing and auction matters. In addition, Aru Bila is also tasked with inspecting other Soppeng areas such as checking village cleanliness, inspecting roads, and inspecting schools.

Keywords: Role, System of Government, and Colonial

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada abad ke-20 terjadi perubahan politik besar-besaran di Sulawesi Selatan dimana pada masa itu ditandai sebagai awal pendudukan dan pemerintahan Belanda secara menyeluruh. Perubahan politik terjadi pada bidang penataan dan pelaksanaan pemerintahan, penetapan dan penerimaan kebijaksanaan serta pengaruh kelompok lapisan terhadap kebijakan pemerintah. Satuan politik yang dulunya merupakan sekutu (*bondgenootschappelijke*) dihapuskan dan digantikan menjadi wilayah pemerintahan dan kekuasaan langsung pemerintah Hindia Belanda. Berbagai bentuk satuan politik baik Kedatuan, Kerajaan maupun Kesultanan yang ada di wilayah tersebut ditiadakan. Aturan-aturan yang lama diganti peraturan yang baru yang sesuai dengan ketetapan pemerintah Belanda.¹

Dalam penataan dan pelaksanaan pemerintahan, pemerintah Hindia Belanda mulai menata susunan pemerintahan baru di daerah tersebut. Pemerintahan Sulawesi dan daerah bawahannya (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*) disusun secara bertingkat ke bawah bagian pemerintahan (*Afdeeling*), cabang pemerintahan (*Onderafdeeling*), daerah adat (*adatgemeenschap*), dan kampung (*kampong*).

¹ Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Kota Makassar 1906-1942*, (Yogyakarta: Ombak), hlm. 3.

Tingkatan tertinggi yaitu pemerintahan dan cabang pemerintahan dipegang oleh pejabat pemerintah Belanda dengan jabatan asisten residen (*assistent-resident*) dan kontrolir (*controleur*). Sedangkan pada tingkatan daerah adat dan kampung dipegang oleh penguasa lokal dengan jabatan regen (*regent*) dan kepala kampung (*hoofd*).²

Dalam melakukan perluasan kekuasaan, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Bone sebagai sasaran utama karena merupakan suatu kekuatan besar dan kuat diantara berbagai satuan politik yang ada di Sulawesi Selatan. Penaklukan Bone ditandai dengan jatuhnya Watampone pada 30 Juli 1905 kemudian perluasan dilakukan pada daerah Sulawesi Selatan lainnya seperti pada 24 September 1905 para militer Belanda bergerak menuju Watansoppeng.³

Watansoppeng merupakan Ibukota dari Soppeng terletak di sebelah Barat-Tengah Kabupaten. Soppeng terletak di tengah-tengah semenanjung Sulawesi Selatan berjarak sekitar 175 km sebelah Timur-timur Laut dari Ujung Pandang.⁴ Batas-batas Soppeng dengan Kabupaten sekitarnya adalah sebagai berikut: di sebelah Utaranya berbatasan dengan Sidenreng-Rappang (Sidrap); sebelah Selatannya dengan

² *Ibid.*, hlm. 3-4.

³ Rahmatullah, "Watang Lipu La Palloge" dalam *Menentang Imperialisme Belanda di Kerajaan Soppeng (1905-1906)*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar), hlm. 6.

⁴ Millar, Susan Bolyard, *Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial dan Budaya di Balikinya*, (Makassar: Innawa, 2018), hlm. Xv.

Kabupaten Bone, sebelah Timurnya dengan Kabupaten Wajo dan Bone; dan sebelah Baratnya dengan Kabupaten Barru.⁵

Pemerintahan Soppeng dipegang oleh Datu yang dipilih oleh *Arung Eppae ri Soppeng* yang diberi gelar *pangepa* dan *pabbicara*.⁶ Kedatuan di Soppeng dimulai dengan kedatangan To Manurung ketika Soppeng dilanda kekeringan dan kelaparan. Pada waktu itu telah terbentuk dua kelompok besar yang berjumlah 60 orang dan terbagi pada dua wilayah besar yaitu 30 orang di Soppeng ri Aja yang berpusat di Sewo dan 30 orang di Soppeng ri Lau berpusat di Gattareng⁷.

Sekitar tahun 1300-an para *matoa* (kelompok yang telah ada sebelum terbentuknya Kedatuan Soppeng) sepakat untuk mengadakan rapat untuk membahas masalah yang melanda Soppeng. Ketika berlangsungnya rapat dua burung saling berebut setangkai padi mencuri perhatian para *matoa*, sehingga diikuti oleh burung tersebut hingga ke Leworang. Disana To Manurung sedang duduk diatas batu dan atas kesepakatan para *matoa* diangkatlah menjadi datu di Soppeng ri Aja dengan gelar Petta Manurunge ri Sekkanyili dan sepupunya yang turun dari kayangan

⁵ Abdurrazak Daeng Patunru, *Bingkisan Patunru Sejarah Lokal Sulawesi Selatan*, (Makassar: Pusat Kajian Indonesia, 2004), hlm. 94.

⁶ Staden Ten Brink, *Zuid Celebes*, 1884, (Utrecht: Kemink & Zoon).

⁷ Dodi Doigo Rahmada, dan Patahuddin, *Dinamika Pemerintahan Soppeng Pada Masa Afdeeling Bone Hingga Masa Pemerintahan Andi Wana 1905-1960*, dalam *Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Kesenjaraan*, Vol. 7, (Makassar, 2020), hlm. 173.

bernama Petta Manurunge ri Gowarie sebagai Datu di Soppeng ri Lau.⁸ Lahirlah di Soppeng Kedatuan kembar yang oleh masyarakat lokal disebut *dua datu seddi ata* atau dua Datu satu rakyat.

Ketika masa pemerintahan La Mataesso sebagai Datu Soppeng ri Aja ke-11 dan La Makkaroda To Tenribali Mabbeluaqe sebagai Datu Soppeng ri Lau terjadi perselisihan antar keduanya yang dimenangkan oleh La Mataesso membuat La Makkaroda meninggalkan Soppeng dan tahtanya, sehingga La Mataesso menguasai keseluruhan Soppeng. Kemudian Soppeng ri Lau dileburkan ke dalam Soppeng ri Aja⁹ dan berdirilah Kedatuan Soppeng satu *datu* satu rakyat.

Dalam catatan lontara, Datu Soppeng ke-IV We Takkewanua memiliki dua putra. Putra bungsunya bernama La Makkanenga diangkat menjadi Datu Soppeng kemudian putra sulungnya bernama La Wadeng diangkat pula menjadi penguasa di Kedatuan Soppeng. Tujuannya untuk ikut membantu adiknya dalam menjaga keselamatan baik harta benda, keluarga serta keamanan Soppeng.¹⁰ La Wadeng diberi gelar Aru Bila, gelarnya berasal dari tempat tinggalnya yaitu kampung Bila.¹¹

⁸ Abdurrazak Daeng Patunru, *op.cit.*, hlm. 95-96.

⁹ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁰ Makmun Badaruddin, et.al., *Lontarak Soppeng*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hlm. 126.

¹¹ Cohen, *Memorie van Overgave van den gezaghebber van Soppeng*, (National Archief Nederland, 1932), hlm. 152.

Aru Bila disebut *pangepa* pada struktur pemerintahan dalam Kedatuan Soppeng. Struktur pemerintahan dengan jabatan *pangepa* pertama kali digunakan pada masa pemerintahan Datu La Makkanenga. *Pangepa* ini memiliki fungsi memelihara, mengasuh, menjaga keselamatan dan kesejahteraan Datu serta seluruh negeri dan rakyat.¹² Aru Bila La Wadeng kemudian mengangkat tiga orang *pabbicara* yang akan membantunya dalam pengelolaan dan penegakan keadilan di Kedatuan Soppeng.¹³

Setelah La Wadeng tidak lagi menjadi Aru Bila ataupun *pangepa*, kedudukannya kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama La Passajo sebagai Aru Bila kedua. Tenri Jekka menjadi Aru Bila ketiga menggantikan La Passajo. Dari gambaran singkat mengenai penerus Aru Bila atau *pangepa*, dapat disimpulkan bahwa *pangepa* merupakan suatu jabatan yang diwariskan secara turun temurun, sesuai dengan sistem pewarisan kedudukan bangsawan yang berlaku.¹⁴

Pada 25 September 1905, angkatan militer Belanda tiba di Watansoppeng dibawah pimpinan Kolonel C.A. Van Loenen. Pada waktu kedatangan Belanda ini, yang menjadi Aru Bila ialah La Tenridolong Baso Bila anak dari La Matalatta Aru Bila kedelapan belas dengan I Makkulle. Kedatangan Belanda disambut baik oleh

¹² Pananrangi Hamid, *Sejarah Kabupaten Daerah TK.II Soppeng*, (Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991), hlm. 101.

¹³ Cohen, *loc.cit.*

¹⁴ Pananrangi Hamid, *op.cit.*, hlm. 103.

Datu Soppeng yang pada waktu itu dipimpin oleh Siti Zaenab, hal ini ditandai dengan pengibaran bendera Belanda di kediaman Datu Soppeng. Kedatangan militer Belanda dimaksudkan untuk bertemu dengan Datu Soppeng untuk melakukan penandatanganan perjanjian pendek (*korte verklaring*) namun pada waktu itu Datu dalam keadaan kurang sehat, sehingga diwakili oleh Aru Bila beserta tiga orang *pabbicara* dan anggota Hadat.¹⁵

Meskipun Datu Soppeng bersedia menandatangani *korte verklaring* namun beberapa anggota Kedatuan menolak pernyataan tersebut dengan tidak menghadiri rapat dan melakukan perlawanan seperti yang dilakukan oleh Sulle Datu Soppeng Baso Balusu (wakil Datu Soppeng), Watan Lipu La Palloge (Kepala angkatan perang Kedatuan Soppeng), Datu Mario ri Awa La Mappe dan beberapa bawahannya. Setelah dilakukan tekanan militer terhadap para penentang akhirnya pasukan Belanda berhasil memadamkan gerakan perlawanan di Soppeng.¹⁶

Penandatanganan Perjanjian Pendek (*korte verklaring*) berarti kekuasaan tertinggi diserahkan kepada pemerintah Belanda. Adapun susunan pemerintahan pada masa pemerintahan kolonial sebagai berikut: 1) Kontrolir, 2) Juru tulis, 3) Datu, 4) Sulle Datu, 5) Aru Bila, 6) Pabbicara, 7) Watang Lipu. Inilah susunan pemerintahan yang digunakan pada masa pendudukan Belanda. Jabatan kontrolir dipegang oleh

¹⁵ Rahmatullah, *op.cit.*, hlm. 6-7.

¹⁶ Abdurrazak Daeng Patunru, *op.cit.*, hlm. 113.115.

pejabat Belanda yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan di *onderafdeeling* Soppeng.¹⁷

Pada tahun 1908 Daeng Pabarang atau Petta Barang menggemparkan Soppeng dengan gerakan mistiknya. Ia mengajarkan ilmu kesaktian, memberikan mantra yang kebal kepada orang-orang di desa sehingga dalam waktu singkat jumlah pengikutnya sangat banyak. Hal ini membuat penguasa lokal maupun pemerintah Belanda khawatir terganggunya keamanan di Soppeng dan lebih dikhawatirkan apabila gerakan ini berlatar belakang politik pastinya akan mengancam kedudukan pemerintah Belanda. Dalam gerakan Daeng Pabarang terlibat beberapa orang terkemuka Soppeng seperti La Tenrisessuq Datu Bakkeq (putera dari Datu Tanete We Tenriolle), La Tomanggong Arung Ujung dan La Matinro Arung Tung sehingga para pemerintah berusaha untuk menangkap Daeng Pabarang, serta orang terkemuka (La Tenrisessu, La Tomanggong dan La Matinro Aru Tung) yang terlibat. Pada 1913 akhirnya Daeng Pabarang ditangkap oleh Aru Bila La Tenridolong Baso Bila kemudian dijatuhi hukuman oleh Hadat Soppeng yaitu penjara 20 tahun lamanya yang ia jalani di Jawa hingga meninggal dunia.¹⁸

Pada 1920-an mulai berkembang organisasi sosial dan politik di Sulawesi Selatan yang membuat pemerintah Hindia Belanda khawatir kekuasaannya terancam

¹⁷ Dodi Doigo Rahmada, dan Patahuddin, *op.cit.*, hlm. 177.

¹⁸ Abdurrazak Daeng Patunru, *op.cit.*, hlm. 120.

sehingga pada 1926 dipulihkan kembali Kedatuan Soppeng menjadi daerah pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*) atau daerah swapraja agar pemerintah Hindia Belanda dapat bekerja sama dengan bangsawan yang sebelumnya telah disingkirkan. Kemudian diangkat kembali Siti Zaenab Arung Lapajung menjadi Datu Soppeng.¹⁹

Dengan dipulihkannya Kedatuan Soppeng, membuat Datu Soppeng bersama dewan hadat aktif dalam pemerintahan. Dewan hadat selaku pelaksana pemerintahan terdiri atas lima anggota dewan yaitu, Datu Soppeng Siti Zaenab sebagai ketua, Aru Bila La Tenridolong Baso Bila sebagai penanggung jawab pemerintahan umum, seorang *pabbicara* untuk kehakiman, seorang *pabbicara* untuk kepolisian, dan seorang *pabbicara* untuk pekerjaan umum. Suami Siti Zaenab sebagai *Sulle Datu* namun tidak termasuk dalam dewan hadat.²⁰

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian perlu dilakukan perumusan masalah yang bertujuan agar mempermudah peneliti sejarah dalam memperoleh sumber yang relevan dan sesuai dengan topik yang diteliti. Dari latar belakang dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Aru Bila setelah pemerintah Belanda menaklukkan Kedatuan Soppeng?

¹⁹ Syahrir Kila, et.al., *Soppeng Dari Tomanurung Hingga Masa Penjajahan Belanda*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2018), hlm. 224.

²⁰ Abdurrazak Daeng Patunru, *op.cit.*, hlm. 121.

2. Apa peran Aru Bila pada masa pemerintahan kolonial tahun 1905-1935?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penulisan sejarah terdapat dua hal penting yang menjadi batasan penting yaitu batasan spasial dan batasan temporal. Batasan spasial dalam hal ini ialah batasan mengenai tempat/wilayah penelitian yaitu Sulawesi Selatan khususnya Soppeng, sedangkan batasan temporal penelitian ini yaitu pada tahun 1905-1935. Penelitian ini dimulai pada 1905 karena pada masa itu Belanda mulai melakukan perluasan kekuasaan di Sulawesi Selatan tidak terkecuali di wilayah Soppeng, sedangkan 1935 dipilih menjadi tahun berakhir penelitian ini sebab pada tahun tersebut Aru Bila La Tenridolong Baso Bila yang menjadi tokoh dalam penelitian ini meninggal dunia.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan Aru Bila setelah pemerintah Belanda menaklukkan Kedatuan Soppeng
2. Untuk mengetahui dan memahami peran Aru Bila pada masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1905-1935.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk melengkapi referensi mengenai Peran Aru Bila dalam Sistem Pemerintahan Kolonial di Soppeng tahun 1905-1935.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi dan wawasan kepada pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan hal yang penting dicantumkan dalam sebuah penelitian agar diketahui keterkaitan judul penelitian dengan sumber yang digunakan. Beberapa sumber tertulis yang telah mengkaji mengenai Aru Bila dalam Sistem Pemerintahan Politik Kolonial di Soppeng Tahun 1905-1935 adalah sebagai berikut:

Dalam buku Edward L. Poelinggomang yang berjudul *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942* menjelaskan mengenai perubahan politik dan hubungan kekuasaan pada pelaksanaan pemerintahan yang terjadi di wilayah bagian pemerintahan Makassar tahun 1906-1942 serta dibahas pula mengenai peralihan kekuasaan kepada pemerintah kolonial yang semula kekuasaan tertinggi dipegang oleh para bangsawan.

Buku Abdurrazak Daeng Patunru yang berjudul *Bingkisan Patunru* menjelaskan mengenai asal mula berdirinya Kedatuan Soppeng. Dijelaskan pula mengenai perkembangan Kedatuan Soppeng dari masa pemerintahan To Manurung hingga Datu terakhir yaitu Andi Wana yang kemudian Soppeng dijadikan sebagai daerah otonom tingkat II pada 1958 berdasarkan undang-undang darurat No.4 tahun 1957.

Buku *Kerajaan Soppeng dalam Tellumpocoe* yang ditulis oleh Sritimuryati menjelaskan mengenai persekutuan antar Soppeng, Wajo dan Bone yang dikenal dengan nama *Tellumpocoe* atau *Mallamung patue ri Timurung*. Keterlibatan Soppeng dalam perjanjian politik tersebut merupakan suatu langkah untuk memajukan berbagai bidang kehidupan Soppeng.

Buku oleh Syahrir Kila, Sahajuddin, dan Muhammad Amir dengan judul *Soppeng dari Tomanurung hingga Penjajahan Belanda* merupakan satuan dari tiga penulis mengenai Sejarah Kedatuan Soppeng yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan mengenai Sejarah Soppeng sejak masa To Manurung hingga masuknya Islam di Soppeng, selanjutnya bagian kedua mengenai perkembangan Kedatuan Soppeng pada masa sebelum dan sesudah perang Makassar. Dan bagian ketiga berisi tentang Soppeng di masa pemerintahan Hindia Belanda.

Jurnal *Politik Etis Kerajaan Soppeng tahun 1905-1942* oleh Irwansya Putra dkk. menjelaskan mengenai pelaksanaan politik etis di Kedatuan Soppeng ketika

pendudukan Belanda pada 25 September 1905, dijelaskan pula mengenai bentuk penerapan serta dampak dari pelaksanaan kebijakan politik etis tersebut.

Jurnal *Dinamika Pemerintahan Soppeng Pada Masa Afdeeling Bone Hingga Masa Pemerintahan Andi Wana* oleh Dodi Doigo Rahmada dan Patahuddin berisi tentang Soppeng pada masa pemerintahan Belanda dan merupakan cabang dari daerah pemerintahan Bone. Dijelaskan pula mengenai kondisi pemerintahan di Soppeng pada masa pendudukan Jepang pada 1942-1946, masa Negara Indonesia Timur serta proses pembentukan Soppeng menjadi daerah tingkat II.

Muhammad Amir dalam jurnal yang berjudul *Gerakan Petta Barang di Daerah Bugis pada 1906-1913*. Jurnal ini menjelaskan mengenai gerakan perlawanan Petta Barang terhadap pemerintah Belanda khususnya di daerah Bone dan Soppeng serta dijelaskan juga penumpasan gerakan Petta Barang yang ditangkap oleh Aru Bila La Tenridolong Baso Bila.

Umumnya penelitian ini hampir sama dengan beberapa rujukan sumber yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu membahas mengenai Kedatuan di Soppeng dari awal pembentukan hingga Soppeng menjadi daerah otonom tingkat II namun penelitian ini lebih fokus terhadap kedudukan Aru Bila setelah pemerintah Belanda berhasil menaklukkan wilayah Sulawesi Selatan khususnya Kedatuan Soppeng dan seperti apa peran Aru Bila La Tenridolong Baso Bila dalam sistem pemerintahan kolonial tahun 1905-1935.

1.6.2. Landasan Konseptual

Peran dalam KBBI dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Merton dalam artikel yang berjudul “Perangkat peran (*role-set*): problem-problem dalam teori sosiologi” dalam *The British Journal of Sociology* mendefinisikan status dan peran sebagaimana dibuat oleh Ralph Linton. Status berarti suatu posisi di dalam struktur sosial yang disertai dengan hak dan kewajibannya. Sedangkan peran diartikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Menurut Linton, setiap status mempunyai satu peran. Setiap individu di dalam masyarakat memiliki banyak status yang disebutnya *status-set*. Oleh karena itu setiap individu juga memiliki banyak peranan dan disebutnya *role-set*.²¹

Syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

²¹ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Maumere, Flores-NTT: Penerbit Ledalero, 2021) , hlm. 90-91.

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun pembagian peran menurut Soerjono Soekanto yang mana peran dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivis kelompok, seperti pengurus, pejabat dan sebagainya.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.²²

²² Syaron Brigitte Lantaeda, et.al., *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPMJD Kota Tomohon* dalam *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 4, no. 48, hlm. 2.

Berdasarkan dari ketiga pembagian peran menurut Soerjono Soekanto, Aru Bila termasuk dalam peran aktif. Hal ini ditunjukkan dari kedudukan Aru Bila sebagai pejabat pemerintah di kedatuan Soppeng dan memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahan.

Aristoteles membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya menjadi enam yakni monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, republik (politea) dan demokrasi. Sedangkan Polybius membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang yang memerintah serta sifat pemerintahannya. Berdasar sudut pandang ini dapat dibedakan enam jenis pemerintahan yakni monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi dan anarki (oklorasi).

Sunarso membagi pengertian sistem pemerintahan dalam tiga sudut pandang yang berbeda. Pengertian pertama, dalam arti sempit sistem pemerintahan dapat berarti sebuah kajian yang melihat hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara seperti sistem parlementer dan sistem presidensial. Dalam pengertian kedua, sistem pemerintahan dalam arti luas yakni suatu kajian pemerintahan negara yang bertolak dari hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dengan bagian-bagian yang ada di dalam negara seperti negara kesatuan, negara serikat (federal) dan negara konfederasi. Sedangkan pengertian ketiga, sistem pemerintahan dalam arti sangat luas, yakni kajian yang menitik

beratkan hubungan antara negara dengan rakyatnya seperti sistem pemerintahan monarki, pemerintahan aristokrasi dan pemerintahan demokrasi.²³

Sistem pemerintahan menurut Dasril Radjab dalam buku *Hukum Tata Negara Indonesia* terdiri dari dua kata yaitu sistem dan pemerintahan. Dilihat dari segi etimologi, sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bersama-sama untuk menghasilkan suatu tujuan. Sedangkan pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dan sebagainya) memerintah.²⁴

²³ Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 1-2.

²⁴ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 57.

1.7. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian sejarah terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, penafsiran dan tahap penulisan.

Tahap pertama yaitu pengumpulan sumber. Sumber sejarah dapat berupa tulisan, lisan dan benda. Sumber tulisan terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu sumber yang ditulis bersamaan dengan kejadian suatu peristiwa sejarah, sumber ini dapat berupa arsip. Sedangkan sumber sekunder yaitu tulisan yang tidak sezaman dengan peristiwa sejarah yang ditulis, dapat berupa buku-buku, jurnal atau artikel. Pada tahap ini, pengumpulan sumber yang berkaitan dengan judul penelitian berupa arsip, buku, jurnal dan skripsi. Sumber-sumber tersebut didapatkan dari link National Archief, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, sumber juga didapatkan dengan memanfaatkan jaringan internet berupa aplikasi Google Book dan situs web khusus jurnal.

Tahap kedua yaitu kritik sumber. Kritik sumber dilakukan untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah ditemukan baik berupa arsip, jurnal, maupun buku yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu Peran Aru Bila dalam Sistem Pemerintahan Kolonial di Soppeng Tahun 1905-1935. Sumber yang didapatkan khususnya arsip

kebanyakan menggunakan bahasa Belanda sehingga dalam hal ini diperlukan untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia.

Tahap ketiga adalah penafsiran. Pada tahap ini dilakukan penafsiran data-data yang telah ditemukan. Dalam menafsirkan fakta sejarah perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan pendapat yang subjektif. Kemudian data-data yang telah ditemukan, disatukan sehingga dapat memberi penjelasan terkait judul penelitian. Pada tahap ini sumber-sumber yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis mana yang perlu digunakan dan mana yang tidak perlu digunakan.

Tahap terakhir yaitu penulisan. Penulisan berarti memaparkan atau melaporkan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulisan sejarah adalah usaha untuk menuliskan peristiwa secara kronologi, logis dan sistematis dengan menerangkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh sehingga menghasilkan tulisan ilmiah.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian bertujuan untuk menghasilkan suatu tulisan yang tersusun secara kronologis sehingga dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I pendahuluan berisi sub bab latar, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan. Pada sub bab latar belakang dijelaskan mengenai awal pendudukan Belanda di Sulawesi Selatan khususnya pada daerah Soppeng, kemudian dijelaskan

mengenai Kedatuan Soppeng dan para bawahan Datu seperti Aru Bila. Rumusan masalah berisi rumusan mengenai permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dalam sub bab batasan masalah berisi mengenai pembatasan waktu dan tempat penelitian ini yaitu Soppeng yang dimulai ketika pendudukan Belanda hingga berakhirnya masa pemerintahan Aru Bila La Tenridolong Baso Bila sebab meninggal dunia. Tujuan dan manfaat penelitian berisi mengenai tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian bagi penulis maupun pembaca. Tinjauan pustaka berisi mengenai penelitian terdahulu yang telah mengkaji tema yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian mulai dari pengumpulan sumber hingga tahap penulisan. Dan sistematika penulisan memuat kerangka penulisan yang dijabarkan secara singkat.

Pada bab II akan dijelaskan mengenai bentang alam Soppeng. Kemudian dijelaskan mengenai awal mula terbentuknya Kedatuan Soppeng baik pada masa Dua Datu Seddi Ata begitupun ketika Kedatuan Soppeng Satu Datu Satu Rakyat. Digambarkan pula mengenai struktur pemerintahan pada masa Kedatuan Soppeng sebelum pendudukan Belanda serta penaklukan Soppeng yang dilakukan oleh pemerintah Belanda.

Bab III akan membahas mengenai kebijakan politik pemerintahan Belanda di *Afdeeling* Bone sebagai pusat pemerintahan dari *Onderafdeeling* Soppeng dan kebijakan politik pemerintahan Belanda di *Onderafdeeling* Soppeng.

Bab IV akan membahas mengenai biografi singkat Aru Bila. Selain itu dibahas pula mengenai kedudukan serta peranan Aru Bila sebelum dan setelah pendudukan Belanda di Soppeng

Bab V ini akan ditarik suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Bab ini juga sekaligus menjadi penutup dalam penelitian ini.

BAB II

ONDERAFDEELING SOPPENG 1905-1935

Soppeng merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang terletak di sebelah Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Watansoppeng atau yang dikenal dengan “Kota Kalong” merupakan Ibukota dari Soppeng yang terletak di wilayah Lalabata. Letak astronomis Soppeng ini berada diantara 4° 06’ LS dan 4° 36’ LS 119° 42’ 18” BT dan 120° 06’ 13” BT.¹

Secara administratif, Kabupaten ini berbatasan dengan Sidenreng-Rappang (Sidrap) di sebelah Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone, di sebelah Timur dengan Kabupaten Wajo dan Bone, kemudian di sebelah Baratnya berbatasan dengan Kabupaten Barru. Kabupaten Soppeng berjarak sekitar 174 Km dari Ujung Pandang (sekarang Makassar) yang dapat ditempuh kurang lebih 5 jam perjalanan via Buludua, sedangkan Soppeng berjarak sekitar 235 Km dari Makassar via Pare-pare.

Dilihat dari segi geomorfologis, iklim Kabupaten Soppeng tergolong sedang dengan temperatur udara $\pm 24^{\circ}$ - 30° C. Soppeng berada di deprisiasi sungai WalanaE yang terdiri atas tanah dataran dan perbukitan dengan luas daerah ± 700 km², tanah dataran yang berada pada ketinggian rata-rata ± 60 m di atas permukaan laut,

¹ Pananrangi Hamid, *Sejarah Kabupaten Daerah Tk. II Soppeng*, (Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991), hlm. 17.

sedangkan ±800km² merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata 200m di atas permukaan laut. Dari data mengenai letak geomorfologis wilayah Soppeng ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata wilayahnya terletak pada tempat ketinggian atau wilayah perbukitan.²

Suplai air di Soppeng didukung oleh enam sungai besar yaitu Sungai Langkemme, Sungai WalennaE, Sungai Soppeng, Sungai Lawo, Sungai Paddangeng dan Sungai Lajaroko. Sungai ini merupakan pendukung utama pelaksanaan pertanian dengan menggunakan irigasi teknis. Selain sungai, terdapat pula beberapa gunung seperti gunung Neneconang dengan ketinggian 1.463 m, gunung Sewo setinggi 860 m, gunung Lapancau 850 m, Buludua setinggi 800 m, dan Pauwengeng dengan ketinggian 760 m.³

2.1. Terbentuknya Kedatuan Soppeng:

2.1.1. Kedatuan Soppeng *Dua Datu Seddi Ata*

Sistem pemerintahan di Soppeng sebelum terbentuknya Kedatuan dapat dikatakan sangat sederhana. Sekitar abad ke-13 masyarakat hidup secara berkelompok yang terbagi dalam dua kelompok besar. Kelompok ini terbagi dan menyebar pada dua wilayah besar yang masing-masing terdiri dari 30 kelompok.

² *Ibid.*, hlm. 17-20.

³ *Ibid.*, hlm. 25-26.

Pesse, Pising, Launga, Mattobulu, Ara, Lisu, Lawo, Madello Rilau, Tinco merupakan wilayah Soppeng Riaja yang berpusat di Sewo dan di Soppeng Rilau yang berpusat di Gattareng dengan wilayah Kubba, Panincong, Talagae, Riattang, Salo, Mangkuttu, Maccile, Watu-watu, Akkampung.⁴ Dalam satu kelompok, baik kelompok besar di dalam *wanua*⁵ atau kelompok kecil dalam *limpo*⁶ dipimpin oleh anggota kelompok yang paling tua dan disegani. Pemimpin kelompok inilah yang disebut dengan *matoa*.⁷ Sistem pemerintahan seperti ini mengakibatkan rawan terjadinya konflik di antara kelompok itu sendiri karena banyaknya kelompok-kelompok dalam satu wilayah.⁸

Seiring berjalannya waktu, para *matoa* mengalami kesulitan yang merupakan akibat dari pakeklik yang terjadi di wilayah mereka. Pertikaian antara kelompok pun tidak dapat dihindarkan. Kekacauan dan pertikaian yang terjadi diakibatkan dari

⁴ Pananrangi Hamid, et.al., *Surek Poada Adaengngi Tanae ri Soppeng*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994/1995), hlm. 53.

⁵ *Wanua* merupakan gabungan dari beberapa kampung atau desa, yang luasnya berbeda dengan *wanua* yang lainnya. Pada masa tersebut, dalam kampung biasanya hanya terdapat 10 hingga 20 rumah saja.

⁶ *Limpo* merupakan bagian dari *wanua* atau wilayah yang tergabung dalam *wanua*.

⁷ *Matoa* dapat diartikan sebagai tetua atau sepuh yang menjadi pemimpin kelompok-kelompok pada masa tersebut

⁸ Muhlis Hadrawi, *Jejak Awal Wanua-wanua Soppeng dan Pertumbuhannya: Kajian Berdasarkan Manuskrip dalam Lembah Walannae: Lingkungan Purba dan Jejak Arkeologi Peradaban Soppeng*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 153-154.

tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Pada masa itu tidak lagi ada aturan dan hukum yang ditaati, yang berlaku hanyalah hukum dimana kelompok yang kuat menguasai kelompok yang lemah. Masa ini dikenal juga dengan masa kegelapan.⁹

Ketika *matoa* Tinco, Jennang Pesse mengetahui kedatangan *To Manurung*, segera disampaikan hal ini kepada *matoa* Ujung, *matoa* Bila, dan *matoa* Botto. Kemudian ketiga *matoa* mengarahkan untuk berita ini disampaikan kepada *matoa* wilayah Soppeng Rilau.¹⁰ Para *matoa* akhirnya sepakat untuk pergi menemui *To Manurung* tersebut. Dan setelah mereka sampai di hadapan *To Manurung*, mereka menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya yaitu untuk menjadikannya sebagai junjungan atau pemimpin. Hal ini pun disambut baik oleh *To Manurung*, dengan syarat warga Soppeng tidak mengkhianatinya dan menjadikan sepupunya yang turun di Libureng sebagai Datu di Soppeng Rilau.

Berangkatlah para *matoa* ke Libureng untuk menemui sepupu Petta Manurungge Ri Sekkannyili. Setibanya di Libureng, *matoa* Bila, *matoa* Botto, dan *matoa* Ujung menyampaikan kepada Manurunge Ri Goarie untuk menjadikannya Datu di Soppeng Rilau dan diterima oleh Petta Manurungge dengan syarat mereka tetap taat dan patuh terhadapnya.¹¹

⁹ Syahrir Kila, et.al., *Soppeng Dari Tomanurung Hingga Masa Penjajahan Belanda*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2018), hlm. 13.

¹⁰ Pananrangi Hamid, et.al., *op.cit.*, hlm. 54.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 55-56.

Terjadinya kesepakatan antar kedua belah pihak, akhirnya terbentuklah Kedatuan Soppeng. Kedatuan Soppeng dikenal dengan istilah *Dua Datu Seddi Ata* yang berarti dua Datu satu rakyat. Petta Manurungge Ri Sekannyili atau La Temmamala menjadi Datu di Soppeng Riaja dan Manurungge Ri Goarie menjadi Datu di Soppeng Rilau.¹²

Lahirnya kedatuan kembar ini merupakan suatu hal yang unik dimana prosesnya tidak terjadi melalui peperangan antara keduanya, seperti yang terjadi pada Kerajaan kembar Gowa-Tallo. Kedatuan kembar di Soppeng ini terjadi setelah perkawinan antar kedua Datu, namun keduanya tetap menjadi pemimpin di wilayah kekuasaannya masing-masing, yaitu Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau.¹³

2.1.2. Kedatuan Soppeng Satu Datu Satu Rakyat

Setelah wafatnya Datu Soppeng Riaja yaitu La Deq, maka digantikan oleh putranya yang bernama La Mataesso dan pada Soppeng Rilau diperintah oleh La Makkaroda To Tenribali Mabbeluaqe yang merupakan saudara sepupu dari La Mataesso. Dirikanterjadi perselisihan antara datu Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau.¹⁴

¹² Abdurrazak Daeng Patunru, *op.cit.*, hlm. 96.

¹³ Syahrir Kila, *op.cit.*, hlm. 23-24.

¹⁴ Abdurrazak Daeng Patunru, *op.cit.*, hlm. 98.

Sebelum terjadinya peperangan antara Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau, terlebih dahulu datang Arung Umpungeng menghadap kepada Datu Soppeng Riaja. Kedatangan Arung Umpungeng bertujuan untuk meminta agar wilayahnya dimasukkan ke dalam wilayah pemerintahan Kedatuaan Soppeng Riaja. Permintaan Arung Umpungeng berdasar atas ketidakrelaannya diperintah oleh Datu Soppeng Rilau yang pada saat itu diperintah oleh La Makkaroda.¹⁵

Selain mengungkapkan alasannya untuk masuk di wilayah Soppeng Riaja, janji juga diucapkan Arung Umpungeng bahwa tidak akan terjadi pengkhianatan apabila wilayah Umpungeng diterima untuk menjadi bagian wilayah Soppeng Riaja. Niat baik Arung Umpungeng kemudian disampaikan kepada La Mataesso selaku datu Soppeng Riaja melalui perantara Matoa Bila. Sebelum diterima oleh datu Soppeng Riaja, Arung Umpungeng diterima lebih dulu oleh Paccaleppa Tau Tongenge.

Selanjutnya dipertemukanlah Arung Umpungeng dengan datu Soppeng Riaja kemudian menyampaikan kembali maksud dan tujuan kedatangannya, dimana ia ingin bergabung ke wilayah pemerintahan Soppeng Riaja. La Mataesso sebagai datu Soppeng Raja menerima dengan senang hati setelah mendengar alasan-alasan yang dilontarkan oleh Arung Umpungeng.

Dengan bergabungnya wilayah Umpungeng ke dalam wilayah kedatuaan Soppeng Riaja memberi dampak politik yang luar biasa terhadap kedatuaan Soppeng

¹⁵ Syahrir Kila, *op.cit.*, hlm. 25.

Riaja. Sebaliknya pada Soppeng Rilau posisi politiknya menjadi lemah. Hal ini pula menjadi penyebab kekalahan Soppeng Rilau dalam perang melawan Soppeng Riaja. Peperangan antar kedatuan kembar ini terjadi karena ambisi datu Soppeng Rilau yakni La Makkaroda yang ingin menjadikan Soppeng Riaja menjadi daerah kekuasaannya.¹⁶

Kekalahan La Makkaroda dalam perang saudara tersebut membuatnya terpaksa meninggalkan Soppeng kemudian pergi ke Bone.¹⁷ Sebelum meninggalkan Soppeng, utusan La Mataesso datang menemui La Makkaroda. Maksud dan tujuan kedatangan utusan La Mataesso untuk membujuk La Makkaroda agar tetap menjadi datu di Soppeng Rilau dan tidak meninggalkan wilayah kekuasaannya. Namun upaya yang dilakukan tidak mencapai hasil yang diinginkan, dimana La Makkaroda tetap teguh pada pendiriannya untuk meninggalkan wilayah Soppeng.¹⁸

Tujuan La Makkaroda menuju Bone berharap agar Aru Bone bersedia membantunya dalam rencana penyerangan terhadap kedatuan Soppeng, namun apa yang diharapkan tidak terkabulkan. Aru Bone menolak permintaan La Makkaroda dengan alasan menghindari terjadinya permusuhan dikemudian hari antara Soppeng dan Bone yang telah lama menjalin hubungan dengan baik.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 25-26.

¹⁷ Abdurrazak Daeng Patunru, *loc.cit.*

¹⁸ Syahrir Kila, *op.cit.*, hlm. 27.

Meskipun permohonannya ditolak namun ia tetap tinggal di wilayah Kearungan Bone dan menikah dengan saudara perempuan dari Aru Bone Tenrirawe Bongkangnge yang bernama We Tenripakkuwa. Setelah perkawinan antara La Makkaroda dengan We Tenripakkuwa datang lagi utusan La Mataesso meminta La Makkaroda untuk kembali dan memerintah di wilayah Soppeng Rilau, namun untuk kedua kalinya permintaan tersebut ditolak dengan alasan khawatir akan terjadi perang seperti dulu.¹⁹

Seiring berjalannya waktu, La Makkaroda akhirnya mau berunding dengan La Mataesso. Perundingan ini berbeda dengan kedua perundingan sebelumnya yang diusulkan oleh La Mataesso, sedangkan perundingan ketiga ini merupakan inisiatif dari La Makkaroda. Latar belakang timbulnya keinginan La Makkaroda untuk melakukan perundingan dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, tidak ada satupun kerajaan di wilayah Bone yang bersedia membantunya dalam usaha memerangi kedatuan Soppeng riaja. Kedua, perasaan rindu terhadap keluarga dan tanah kelahirannya yaitu Tanah Soppeng.²⁰

Dari perundingan tersebut menghasilkan sumpah dan janji yang diucapkan oleh La Makkaroda. Janji yang diucapkan berisi penyesalan terhadap apa yang telah diperbuatnya dahulu, tidak akan mengulangi apa yang telah lalu, meminta izin untuk

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 27-28.

²⁰ Pananrangi Hamid., *op.cit.*, hlm. 111.

tetap tinggal di wilayah Soppeng Rilau tanpa memegang jabatan dan kedudukan, serta berpesan kepada keturunannya untuk tidak menginginkan menjadi datu, baik pada wilayah Soppeng Rilau terlebih Soppeng Riaja. Kemudian dilanjutkan dengan upacara *Mallamung Patue* sebagai simbol ikatan perjanjian persahabatan antara La Mataesso sebagai datu di Soppeng Riaja dan La Makkaroda sebagai datu Soppeng Rilau.²¹

Berdirilah kedatuan Soppeng satu datu satu rakyat setelah diikrarkan janji tersebut. Maka diangkatlah La Mataesso sebagai datu Soppeng yang pertama dan setelah penyatuan kedatuan kembar maka pusat pemerintahan dipindahkan ke Lalabata.²²

2.2. Pemerintahan Tradisional Soppeng

Dalam pemerintahan Kedatuan Soppeng, Datu menjadi pemegang tampuk pemerintahan atau dengan kata lain Datu lah yang memegang kekuasaan tertinggi.²³ Masa itu masih terdapat kelompok-kelompok elit yang terdiri dari 3 (tiga) orang

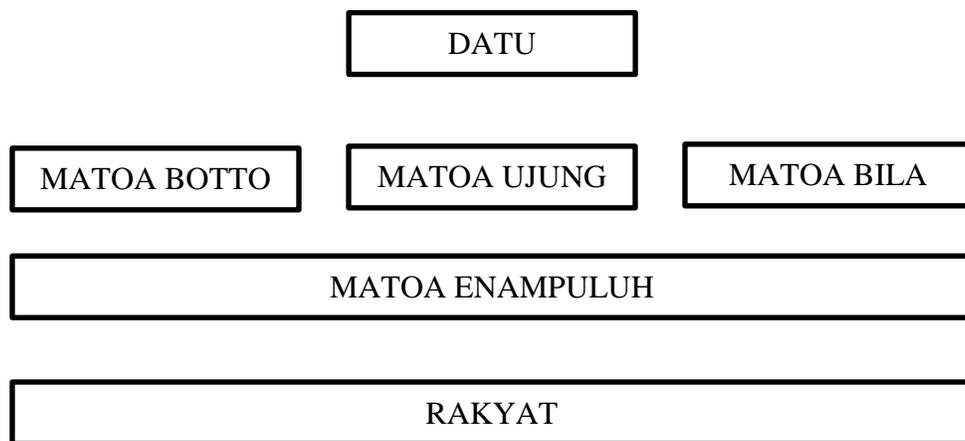
²¹ Syahrir Kila, *op.cit.*, hlm. 30.

²² Pananrangi Hamid, *op.cit.*, hlm. 112.

²³ Salam Baco, *Soppeng Dari Kerajaan Menjadi Kabupaten*, (Soppeng), hlm. 20.

matoa selaku pengambil inisiatif, untuk selanjutnya disetujui oleh 60 (enampuluh) *matoa* lainnya.²⁴

Berikut adalah susunan pemerintahan tradisional Kedatuan Soppeng pada masa pemerintahan To Manurunge La Temmamala:



Berdasarkan bagan struktur pada masa pemerintahan La Temmamala menunjukkan bahwa Datu dalam menjalankan pemerintahan, didampingi oleh tiga orang *matoa*.²⁵ Ketiga *matoa* berwenang dalam memimpin ke enampuluh *matoa* dan *matoa* Bila yang akan melaksanakan putusan kesepakatan dari para *matoa*. Keputusan tersebut baik berupa urusan ke dalam maupun ke luar, serta putusan mengenai di dalam Kedatuan Soppeng.²⁶

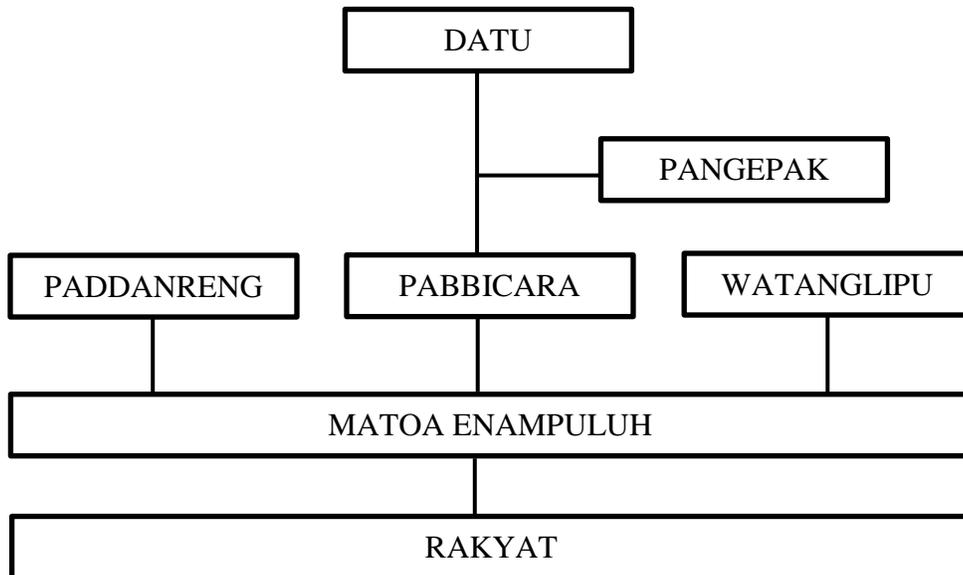
²⁴ Pananrangi Hamid, *op.cit.*, hlm. 99.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 100.

²⁶ Makmun Badaruddin, et.al., *Lontarak Soppeng*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992-1993), hlm. 62.

Susunan pemerintahan tersebut terus berlanjut hingga pada masa pemerintahan Datu Soppeng ke-IV We Takkewanua. Pada masa pemerintahan Datu La Makkanenga sebagai Datu Soppeng ke-V struktur pemerintahan mengalami perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh semakin berkembangnya keturunan-keturunan Datu yang akan menjadi penerus dalam menjalankan pemerintahan.²⁷ Dijelaskan pula dalam lontarak bahwa apabila kedua *To Manurung* telah beranak cucu, maka diadakan jabatan *pangepak* dan *paddanreng* dalam struktur pemerintahan.²⁸

Bagan sturuktur pada masa pemerintahan Datu La Makkanenga:



²⁷ Pananrangi Hamid, *loc.cit.*

²⁸ Makmun Badaruddin, et.al., *loc.cit.*

2.3. Penaklukan Soppeng 1905

Pada tahun 1905 pasukan militer Belanda tiba di Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Kolonel C.A. van Loenen untuk melakukan perluasan wilayah dan kekuasaannya.²⁹ Tujuan dilakukannya perluasan wilayah dan kekuasaan tidak semata-mata untuk menguasai keseluruhan daerah ini, tetapi juga agar mencegah masuknya pengaruh asing pada satuan politik lokal yang ada di Sulawesi Selatan.³⁰ Pemerintah Hindia Belanda menempuh jalur ekspedisi militer dalam melakukan penaklukan wilayah di Sulawesi Selatan. Ekspedisi militer dipilih menjadi cara untuk melakukan perluasan kekuasaan karena para pemimpin politik lokal Sulawesi Selatan yang terkenal sebagai penentang yang gigih terhadap kekuasaan Belanda. Hal ini terjadi pada masa kehadiran *VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie)* yang berkeinginan untuk menguasai perdagangan maritim di kawasan Timur Nusantara pada abad ke-17, sehingga timbullah berbagai gerakan perlawanan.

Gerakan militer yang dilakukan terhadap satuan politik lokal dikenal dengan “politik pasifikasi” (*pacificatie politiek*) yang secara harfiah berarti politik perdamaian. Namun dibalik kebijakan tersebut, yang paling penting ialah bagaimana menguasai secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda. Secara *de jure* wilayah Hindia Belanda berada dibawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, tetapi

²⁹ Syahrir Kila, *op.cit.*, hlm. 201.

³⁰ *Ibid.*, hlm.155.

secara *de facto* sejumlah satuan politik lokal masih dinyatakan merdeka dan berdaulat. Hal inilah yang menyebabkan politik pasifikasi dilaksanakan beriringan dengan pengiriman ekspedisi militer untuk menaklukkan kerajaan yang masih merdeka dan berdaulat yang dalam konsep pemerintahan kolonial diberi status kerajaan sekutu atau sahabat.

Adapun berbagai satuan politik yang belum dikuasai secara langsung dan dianggap sebagai kerajaan sekutu atau pinjaman berdasarkan pembaharuan Kontrak Bungaya (1824) yaitu: Kerajaan Luwu, Gowa, Bone, Wajo, Soppeng, Tanete, Barru, Konfederasi Ajattapareng (Sidenreng, Sawitto, Suppa, Rappang, dan Alitta), Konfederasi Massenrempulu (Enrekang, Maiwa, Duri, Kassa, dan Batulappa), dan Konfederasi Mandar (Balanipa, Sendana, Majene, Pambauang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang).³¹

Kearungan Bone menjadi sasaran utama dalam ekspedisi militer Belanda karena dianggap sebagai satuan politik yang memiliki pengaruh cukup kuat dan gigih dalam menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Setelah Kearungan Bone berhasil dikalahkan, pemerintah kolonial mengerahkan serangannya kepada kerajaan-kerajaan yang ikut membantu Bone dalam perlawanan terhadap pasukan Belanda.

Kedatuan Soppeng merupakan salah satu dari sejumlah satuan politik yang memberikan bantuan pasukan kepada Kearungan Bone ketika pertempuran di Bajoe

³¹*Ibid.*, hlm. 156-157.

dan Pasempe. Selain bantuan dalam bentuk pasukan, Soppeng juga memberikan bantuan berupa perbekalan dan jaminan pengamanan kepada Aru Bone bersama pasukannya ketika berada di daerah Citta. Hal tersebut menjadi penyebab pasukan Belanda yang baru tiba di Soppeng segera mengirimkan pesan kepada Datu untuk menahan Aru Bone. Namun Datu tidak menjalankan perintah tersebut.

Pasukan Belanda tiba di Watansoppeng pada 25 September 1905 dibawah pimpinan C.A. van Loenen. Pemimpin pasukan militer Belanda langsung menemui Siti Zaenab selaku Datu Soppeng. Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa anggota Keadatuan Soppeng dengan tujuan melakukan penandatanganan perjanjian pendek (*Korte Verklaring*). Namun terdapat beberapa anggota Keadatuan yang tidak setuju dan melakukan perlawanan diantaranya Sulledatu Baso Balusu, Watanlipu La Palloge, dan Datu Mario ri Awa.³²

Untuk memadamkan perlawanan yang dilakukan oleh Baso Balusu sebagai pemimpin gerakan, lagi-lagi pemerintah Belanda menggunakan operasi militer untuk menangkap Baso Balusu beserta para pengikutnya. Operasi militer mulai dilaksanakan pada awal Oktober 1905 namun hingga awal November 1905 pemerintah Belanda belum berhasil memadamkan gerakan perlawanan tersebut. Berbagai cara dilakukan pasukan militer Belanda agar gerakan perlawanan dapat dipadamkan, baik dengan gerakan militer maupun pendekatan diplomatis pada

³² *Ibid.*, hlm. 198-202.

akhirnya mampu menumpas gerakan perlawanan di Soppeng. Dengan penumpasan gerakan perlawanan mengakibatkan dilakukannya penandatanganan perjanjian pendek (*Korte Verklaring*).

Penandatanganan perjanjian pendek (*Korte Verklaring*) pada 18 Januari 1906, tidak hanya berdampak pada ditiadakannya kedudukan Kedatuan Soppeng dan peralihan wilayah kekuasaan menjadi wilayah pemerintah Belanda, tetapi juga hilangnya kedudukan para bangsawan atau penguasa lokal. Pemerintahan tradisional Soppeng yang terdiri atas Datu Sitti Zaenab Aru Lapajung, Sulledatu Baso Balusu, Aru Bila La Tenridolong Baso Bila, Watanglipu La Palloge dan tiga pabbicara hadat, secara resmi dihapuskan.³³

³³ *Ibid.*, hlm. 203-204.